

## MEMAHAMI ANCAMAN NEGARA NON-MILITER DAN STRATEGI MENGHADAPINYA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SEKOLAH

Muhamad Hari Purnomo Hadi  
SMK Negeri 1 Sidoarjo  
Jalan Monginsidi, Sidoarjo  
Email : gurumhariph@gmail.com

### ABSTRAK

Bangsa / Negara adalah kesatuan dari manusia-manusia beserta karakternya. Kekuatan karakter sebuah bangsa sangat diperlukan ketika harus berhadapan dengan ancaman terhadap Negara tersebut. Dewasa ini muncul fenomena yang menunjukkan lunturnya karakter bangsa Indonesia sebagai akibat dari serangan – serangan non militer yang membahayakan kedaulatan, kepribadian, keutuhan dan keselamatan bangsa . Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah Pendidikan, sebagai upaya yang sadar dan terencana dengan lebih menekankan pengembangan karakter luhur bangsa. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Di sekolah, mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis karena materi yang diajarkan sangat berkaitan dengan norma atau nilai-nilai yang bisa ditanamkan, dikembangkan, dieksplisitkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Diperlukan strategi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Guru dalam memaksimalkan peran tersebut

**Kata Kunci** : Ancaman Non-Militer, Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

### PENDAHULUAN

Semua negara di dunia, termasuk indonesia menghadapi ancaman yang memiliki potensi membahayakan eksistensinya. Kemungkinan terburuk dari negara yang tidak berhasil menghadapi ancaman adalah bubarnya negara tersebut. Di era modern kita mengenal dua negara yang awalnya besar dan kuat, menjadi lemah kemudian bubar akibat tidak bisa menghadapi ancaman yang dalam hal ini berwujud disintegrasi. Dua

negara tersebut adalah Yugoslavia dan Uni Sovyet. Bubarnya kedua Negara tersebut harus bisa menjadi pelajaran bagi indonesia, sebagai Negara dengan segala keunggulannya juga menghadapi ancaman nyata berupa ancaman yang menggunakan senjata (militer) dan ancaman yang tidak menggunakan senjata (non-militer)

Ancaman Negara non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Ancaman ini menggunakan faktor-faktor non-

militer yang bersifat abstrak, namun mampu membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman non militer salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menyamarkan batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan kesempatan masuknya budaya asing yang secara langsung member pengaruh negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Ancaman Negara di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dengan segala propagandanya dan liberalisme atau paham kebebasan yang mengancam ideologi Negara Pancasila. Gejala munculnya paham –paham tersebut bisa dilihat dari makin maraknya propaganda symbol komunisme, merebaknya pola pikir Atheisme (paham yang mengajarkan penafikan adanya Tuhan), Sekulerisme (Paham yang mengajarkan pemisahan urusan

agama dari Negara) , Hedonisme (Paham yang mengajarkan seseorang untuk mengejar kenikmatan duniawi tanpa mendasarkan pada nilai dan norma) , Seks Bebas, Kapitalisme, dsb. yang merupakan akibat langsung dari pengaruh negatif serangan ideologi asing.

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri adalah tindakan maker atau kudeta, yakni penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman disintegrasi berupa perang saudara atau separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara asing dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.

Ancaman Negara di bidang ekonomi muncul dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri adalah adanya dominasi barang-barang produk asing. Selain itu juga adanya serbuan tenaga asing dan penanaman modal asing secara bebas . Ancaman ekonomi dari dalam berupa banyaknya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.

Ancaman – ancaman non-militer di bidang ideology, politik, ekonomi dan sosial budaya membutuhkan upaya nyata untuk menghadapinya. Upaya tersebut harus direncanakan secara baik, dilaksanakan secara berkesinambungan dan dikontrol secara efektif melalui Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter luhur bangsa.

## **KONSEP ILMIAH / GAGASAN**

Problem lunturnya karakter bangsa kini menjadi perhatian serius dari Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai

ulasan di media massa baik media cetak, maupun media elektronik mengemuka, membahas tentang problem ini, tentang sebab dan akibatnya. Pemerintah bersama para pengamat pendidikan tengah banyak berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang makin marak muncul di masyarakat seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, vandalisme dan kekerasan, seks bebas, perkosaan dan kejahatan seksual lainnya, perusakan, perkelahian massa, perilaku merusak diri, dan sebagainya menjadi problem serius bangsa yang harus segera diupayakan solusinya.

Pentingnya perbaikan karakter bangsa adalah sebagai benteng pertahanan dari segala ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Bangsa dengan karakter yang kuat akan kokoh berdiri dengan tegap sesuai dengan kepribadiannya akan tetap eksis dan maju serta dan tidak terpengaruh oleh dampak negative dari budaya asing dan bahayanya.

Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh penyair dari Mesir, Syaiqi Beiq. Beliau berkata bahwa suatu bangsa akan jaya dan abadi bila akhlaq mulia masih ada padanya, sebaliknya bangsa itu akan musnah bila akhlaq / budi pekerti yang luhur telah hilang dari mereka“.

Upaya perbaikan karakter bangsa, pada dasarnya bisa ditempuh melalui dua pendekatan yang harus dilakukan secara bersamaan dan harus saling bersinergi. Pendekatan pertama, adalah pendekatan “*Top Down*”, yakni pendekatan dari atas, dalam hal ini adalah sikap dan keteladanan karakter dari Pemerintah. Pendekatan “*Top Down*” bisa dilakukan seperti penerbitan peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat, adil dan benar, terlaksannya Pemerintah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tanggung jawab dan anti-korupsi, dan sebagainya. Dengan adanya sikap dan keteladanan karakter dari pemerintah, maka rakyat secara langsung akan melihat, mencermati dan diharapkan bisa meneladani karakter tersebut.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan “*Bottom Up*”, yakni pendekatan dari bawah (rakyat atau masyarakat), dalam hal ini adalah dengan cara melaksanakan Pendidikan kepada rakyat atau generasi bangsa, yang dimulai dari keluarga, sekolah dan Masyarakat.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro (TIM MKDK IKIP Surabaya, 1996 : 20) adalah suatu daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak. Dalam hal ini pendidikan menjalankan perannya sebagai upaya memperbaiki karakter bangsa. Pendidikan merupakan upaya yang bersifat konstruktif (pembangunan) sekaligus bersifat preventif (pencegahan). Pendidikan merupakan upaya konstruktif karena di dalamnya ada kegiatan yang terencana untuk membangun konstruksi karakter siswa yang mulia. Di samping itu pendidikan juga merupakan upaya preventif karena pendidikan merupakan upaya untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik, yang bisa mencegah lahirnya generasi bangsa yang berkarakter hina. Sebagai upaya

pencegahan, pendidikan akan berusaha mengembangkan kualitas dan moralitas generasi muda bangsa dalam berbagai Pendidikan karakter di sekolah memiliki peran penting dalam memperbaiki karakter siswa, mengingat akhir-akhir ini muncul berbagai macam fenomena yang menggambarkan menurunnya kualitas karakter siswa. Di Sekolah, siswa akan belajar mengembangkan sikap, batin, pikiran, ilmu, pengetahuan, keterampilan dan keahliannya sehingga menjadi manusia yang benar-benar berkarakter mulia. Pengembangan karakter ini harus melibatkan komponen budaya sekolah, kebijakan sekolah, serta pengintegrasian nilai-nilai karakter yang nyata dalam pembelajaran. Lebih lanjut, pengembangan karakter ini harus dilakukan secara integratif dan berkesinambungan.

Pengembangan Budaya Sekolah berkarakter menjadi sesuatu yang harus dilakukan agar peran sekolah sebagai pusat pembangunan karakter bisa tercapai. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler harus dirancang dan diarahkan sedemikian rupa sehingga siswa bisa

terbiasa menanamkan nilai karakter di sekolah. Pembuatan kebijakan sekolah, dan penerapan aturan sekolah juga harus sejalan dengan nilai, norma dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini keteladanan dan kepemimpinan kepala sekolah sangat diperlukan.

Pengintegrasian nilai - nilai karakter ke dalam mata pelajaran juga harus dilakukan dalam pembelajaran. Setiap guru di sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi model pengembangan karakter bagi siswa. Sebagai model, guru harus memberi teladan karakter yang mulia, memberi ruang penanaman nilai karakter, dan membiasakan nilai karakter tersebut sebagai "way of life" bagi siswa. Guru yang berkarakter merupakan pendidik karakter, yang memiliki tanggung jawab ikut mewariskan karakter-karakter luhur bangsa kepada siswa-siswanya.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan

pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa, Pancasila merupakan landasan filosofis utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter

bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansial, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa.

Gambaran karakter bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah cerminan dari seluruh ciri-ciri perilaku bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Karakter tersebut antara lain adalah sifat religius, kemanusiaan, kekeluargaan, gotong royong, kerakyatan, keadilan, ramah tamah, dan Bhineka Tunggal Ika. Karakter bangsa juga merupakan pola kebudayaan bangsa Indonesia asli yang mendapat pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan asing yang sesuai dengan karakter bangsa (TIM Penulis MPK – Unesa, 2005 : 189).

Lunturnya karakter bangsa disebabkan karena lunturnya pemahaman dan pengamalan

Pancasila sebagai falsafah (pandangan hidup) bangsa. Pendidikan karakter harus berupaya memahami dan mengamalkan pancasila pada siswa. Sebagai landasan filosofi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan pandangan dan cara hidup yang diangkat dari realitas sosial budaya dan tata nilai dasar masyarakat Indonesia. Nilai dasar ini yang menjiwai dan merupakan perwujudan kepribadian (Karakter) bangsa.

Nilai Pancasila adalah meliputi Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai keadilan Sosial. Nilai-nilai ini pula yang menjadi dasar filosofis penerapan Pendidikan Karakter. Mohammad Noor Syam (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1996 : 52) telah merumuskan nilai-nilai karakter dasar di dalam bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak awal peradaban, terutama meliputi:

- a. Adanya kesadaran keTuhanan dan keagamaan
- b. Kesadaran kekeluargaan, sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat
- c. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menentukan

dan memecahkan masalah secara bersama

- d. Kesadaran gotong-royong, saling menolong
- e. Kesadaran tenggang rasa dan tepo seliro

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Usaha sadar itu harus memiliki relevansi atau keterkaitan dengan lingkungan siswa berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena siswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan budayanya. Siswa hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dikembangkan dalam lingkungannya. Sering kali orang tidak faham tentang hakikat budaya, sehingga seringkali menyamakan makna budaya dengan kebiasaan, padahal makna budaya yang sesungguhnya lebih komprehensif dan lebih mulia. Budaya menurut Edward B. Taylor (Sujiyanto, 2007 : 3) adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang

didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, maka tidak benar jika kita menyebut aktivitas tawuran, korupsi sebagai budaya, sebab secara moral hal tersebut sangat bertentangan.

Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip relevansi terhadap lingkungan budaya, akan menyebabkan siswa terpinggirkan dari budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka siswa tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang "asing" dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih memprihatinkan jika siswa sampai menentang budayanya. Lingkungan Budaya, yang menyebabkan siswa tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal ( RT, RW, desa, kelurahan atau perumahan), lingkungan sekolah, kemudian berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia.

Siswa yang terpinggirkan dari budayanya, sangat rentan terpengaruh oleh budaya asing dan cenderung bersikap menerima

budaya asing tanpa proses pertimbangan yang sejalan dengan Pancasila. Hal ini disebabkan karena dia tidak memahami norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (*valueing*) tersebut. Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik (*Good Citizenship*). Hal ini selaras dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas yakni "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, yakni pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Pendidikan akan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur, yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta senantiasa mengembangkan budaya tersebut. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa



merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Proses pengembangan budaya dan karakter bangsa harus dilakukan secara berkesinambungan di sekolah, dibiasakan melalui budaya sekolah, dikuatkan melalui kebijakan sekolah, diinternalisasikan dalam kegiatan ekstra kulikuler serta dilakukan melalui integrasi ke dalam berbagai mata pelajaran. Dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan jati diri dan bangsa harus tumbuh pada siswa. Kesadaran tersebut dibangun dengan baik melalui sinergi berbagai mata Pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan akan memberikan pemahaman pada siswa untuk menjadi Warganegara yang baik (*Good Citizenship*), yakni warganegara yang religius, cinta tanah air, memiliki pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik. Pendidikan Agama akan memberi pemahaman tentang nilai-nilai agama, Pendidikan bahasa Indonesia mendidik siswa tentang cara berpikir dan berbahasanya. Pendidikan Kewirausahaan akan memberikan pemahaman kepada siswa tentang

nilai kemandirian berwirausaha. Pendidikan Sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan tentang jati diri bangsa di masa lalu yang menghasilkan jati diri bangsa di masa kini dan masa depan, Pendidikan Geografi yang memberi pengetahuan, wawasan, dan nilai yang berkenaan dengan lingkungan, tempat diri dan bangsanya hidup, Pendidikan Sosiologi-Antropologi yang memberikan pemahaman tentang nilai yang hidup di masyarakat, sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang , serta mata pelajaran produktif, dan lain sebagainya.

Guru harus menyadari bahwa secara fitrah, siswa adalah manusia yang diciptakan Tuhan YME dengan bekal akal pikiran dan hati nurani, yang berfungsi sebagai dasar mereka dalam mengetahui mana perbuatan yang baik dan benar, serta mana perbuatan yang buruk dan salah. Artinya secara fitrah dan kodrat siswa adalah manusia yang berkarakter baik. Adapun kenakalan yang siswa lakukan adalah bagian dari proses imitasi dan identifikasi mereka pada lingkungan tempat mereka hidup, sekaligus sebagai

proses pembentukan kepribadian. Guru harus menyadari bahwa peran yang harus dijalankan adalah sebagai teladan dan pembimbing kehidupan siswa. Tanggung jawab Guru bukan sekedar mengajar, melainkan juga mendidik siswa, yakni berupaya untuk memanusiakan siswa agar menjadi manusia.

Selanjutnya, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menyadari betul urgensi keberadaan PPKn, dan misi yang diemban. PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik (*Good Citizenship*), yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada "nation and character building" yakni pembentukan karakter diri yang baik dari segi agama, sosio-kultural, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PPKn dalam rangka

"nation and character building", yakni :

1. PPKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang didukung berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan, yaitu: ilmu agama, politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai dan perilaku demokrasi Negara dan warganegara.
2. PPKn mengembangkan daya nalar (*state of mind*) bagi para peserta didik. Pengembangan karakter bangsa sebagai cara menghadapi ancaman militer merupakan proses pengembangan warganegara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. Sehingga mampu berpikir kritis dan analitis untuk mencegah dirinya terbawa arus negatif globalisasi. PPKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) sebagai landasan

pengembangan nilai dan perilaku demokrasi yang selalu berdasarkan nilai – nilai Pancasila, dengan menjunjung tinggi NKRI, UUD 1945 dan bhineka tunggal ika.

3. PPKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang pendekatan yang lebih kontekstual. Artinya dalam proses pembelajaran, setiap materi yang disampaikan dan diajarkan selalu dikaitkan dengan penerapan dan kondisi yang sebenarnya di tengah masyarakat. Proses pencerdasan ini juga membutuhkan pembelajaran yang inspiratif dari guru PPKn yang juga mampu menginspirasi. Pencerdasan akan menemui kesempurnaan dalam prosesnya ketika PPKn disampaikan melalui pendekatan yang partisipatif dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan penalaran secara nyata. Untuk memfasilitasi pembelajaran PPKn yang efektif

dikembangkan bahan pembelajaran yang interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung untuk menghadapi ancaman non militer yang ada di tengah – tengah masyarakat.

4. Kelas PPKn sebagai laboratorium moral dan demokrasi. Melalui PPKn, pemahaman sikap dan perilaku yang bermoral Pancasila dan demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui ‘mengajar’ (*teaching*), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup (*doing*).

## **PENUTUP**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga

Negara yang baik (Good Citizenship), yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada "Character Building" yakni pembentukan karakter diri yang baik dari segi agama, sosio-kultural, dan sebagainya. Dengan mendidik warga negara menjadi baik dan berkarater luhur sesuai dengan ideologi

#### DAFTAR PUSTAKA

BP7 Pusat, 1995, UUD 1945, P4, GBHN, Bahan Penataran P4, Jakarta, BP7 Pusat

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur, 2010, *Arah dan Prioritas kebijakan Pendidikan Budaya dan Karakter*. Makalah disampaikan dalam Workshop Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Batu, Jawa Timur

Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA/MAK XI Semester 2*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan

Pancasila maka PPKn, dalam hal ini memiliki peran strategis bagi bangsa indonesia agar tetap eksis dan mampu mengatasi berbagai ancaman yang muncul. Khususnya ancaman non militer dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk menyukkseskan peran tersebut maka guru mata pelajaran PPKn harus memiliki pemahaman tentang bidang kajian PPKn, pengembangan, proses dan perannya

Kebudayaan Republik Indonesia

Sujiyanto, Muhlisin, 2003, *Praktik Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA.*, Jakarta: Ganeca Extact

Tim MKDK IKIP Surabaya, 1996, *Pengantar Pendidikan*, Surabaya : University Press IKIP Surabaya

Tim MPK Unesa. 2005. *Pendidikan Pancasila*, Surabaya : University Press

Kisyani, 2010, *Budaya Sekolah*. Makalah disampaikan dalam

Workshop Pendidikan  
Budaya dan Karakter  
Bangsa di Batu, Jawa  
Timur